



BUPATI BATANG,
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017- 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2018, maka dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja perlu melakukan reviu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar memenuhi kriteria indikator dan target kinerja yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja, perlu melakukan penyesuaian pada BAB V Tabel 5.1, BAB VI Tabel 6.10, BAB VI Tabel 6.11, BAB VI Tabel 6.12 dan BAB VI Tabel 6.13, BAB VII Tabel 7.2 dan BAB VIII Tabel 8.1 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017- 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyesuaian tujuan, sasaran, indikator, dan target RPJMD Tahun 2017-2022 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD.

Pasal 3

Penyesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target RPJMD Tahun 2017- 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Bab V Tabel 5.1. Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 disesuaikan dengan Rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Bab VI Tabel 6.10. Hubungan Misi dengan Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Bab VI Tabel 6.11. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 1 RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Bab VI Tabel 6.12. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 2 RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Bab VI Tabel 6.13. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 3 RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Bab VI Tabel 6.14. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 4 RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Bab VII Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Bab VIII Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penyesuaian tujuan, sasaran, indikator, dan target RPJMD Tahun 2017-2022 digunakan oleh Perangkat Daerah untuk:

- a. menyusun rencana strategis;
- b. merencanakan program/kegiatan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran; dan
- d. menyusun dokumen evaluasi rencana kerja.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Juli 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 25 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ACHMAD TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 34 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYESUAIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR,
 DAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Tabel 5.1.
 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ket	Stn	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Misi I: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City yang didukung pengembangan kerjasama													
A	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi			Skor	na	55,03	60,05	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	
		OPD yang mendapat opini WBK			opini	2	3	4	5	6	7	8	8	
		Meningkatnya pelayanan public bagi masyarakat Batang	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Indeks	na	78,23	80,05	82,57	84,23	87,67	90,32	90,32	
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Indeks Profesionalitas ASN		Indeks		73,37	79,03	82,63	85,61	87,27	91,54	91,54	
			Nilai SAKIP		Skor	56,60	58,19	60,05	60,53	63,21	67,82	70,11	70,11	
			Opini BPK		Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Nilai LPPD		peringkat	170	160	150	140	130	120	110	110	
			Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)		Skor	na	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,60	
Smart City/ Smart Village		%	na	4,18	6,28	8,37	10,46	12,55	14,64	14,64				

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ket	Stn	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2	Misi 2: Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu													
A	Meningkatkan kualitas manusia Batang seutuhnya	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)			Indeks	66.38	67.30	68.22	69.14	70.06	70.98	71.90	71.90	
			Meningkatnya pelayanan kesehatan yang paripurna secara holistic	Angka Harapan Hidup		tahun	74,46	74.50	74.54	74.58	74.62	74.66	74.70	74.70
			Meningkatnya pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SD/MI dan SMP/MTs	(SMA/SMK kewenangan Pemprov)	angka	6,27	7,08	7,10	7,13	7,15	7,17	7,20	7,20
B	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkeadilan gender serta pengendalian penduduk	Indeks Desa Membangun (IDM)			Indeks	na	0,6233	0,6265	0,6297	0,6329	0,6361	0,6393	0,6393	
			Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		indeks	90.99	91.58	92.17	92.76	93.35	93.94	94.53	94.53
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		indeks	68.58	69.89	71,03	72,18	73,35	74,55	75,76	75,76
				Kecamatan ramah Anak		%	na	13.33	26.67	40.00	53.33	66.67	80.00	80.00
			Terwujudnya pengendalian penduduk dan	Pertumbuhan Penduduk per tahun		%	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74	0,70	0,70

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ket	Stn	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			meningkatnya validitas database kependudukan	Menurunnya persentase data ganda dan anomali		%	10	9,5	9,0	8,5	8,0	7,5	7,0	7,0
			Meningkatkan kemampuan pemuda berwirausaha dalam mengelola potensi local serta pengembangan industry kreatif	Persentase lapangan usaha yang diciptakan oleh pemuda		%	na	15,00	19,00	25,00	32,00	39,00	45,00	45,00
			Meningkatnya akses permodalan, kualitas dan daya saing koperasi serta UMKM	Kontribusi jasa keuangan terhadap lapangan usaha "jasa keuangan dan asuransi" pada PDRB ADHB		%	na	14,50	14,75	15,00	15,25	15,50	15,75	15,75
				Pertumbuhan produktifitas UMKM		%	3,31	3,33	3,36	3,37	3,42	3,45	3,50	3,50
3	Misi 3: Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas dan ramah lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.													
A	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi			%	4,93	5,11	5,23	5,41	5,73	5,81	5,93	5,93	
		Pendapatan Per Kapita			Rp juta /jiwa	22,94	23,20	23,80	24,60	25,45	26,10	27,00	27,00	
		Meningkatnya jumlah nilai investasi dan	Jumlah Realisasi nilai investasi		Rp/ Milyar	na	186,84	198,00	217,80	240,00	264,00	290,00	290,00	
			TPT (Tingkat		%	4,17	4,17	3,97	3,76	3,61	3,50	3,23	3,23	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ket	Stn	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			lapangan kerja baru bagi masyarakat	Pengangguran Terbuka)										
				Pertumbuhan Industri		%	na	0.60	0.70	0.80	0.80	0.90	0.90	0.90
				Kontribusi sector industri pengolahan terhadap PDRB-ADHB		%	na	24.12	24.24	24.36	24.48	24.61	24.73	24.73
			Meningkatnya produktifitas pangan dan pertanian serta kawasan perdagangan	Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB-ADHB		%	24.00	24.12	24.24	24.36	24.48	24.61	24.73	24.73
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah		Skor	84.80	85.60	86.50	87.40	88.20	89.10	89.10	89.10
				Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB (ADHB)		%	na	12.12	12.20	12.24	12.30	12.34	12.40	12.40
			Berkembangnya objek pariwisata unggulan dan destinasi wisata baru kawasan pesisir	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB		Rp (juta)	1.839,28	2.404,86	3.512,97	5.131,67	7.496,23	10.950,32	15.995,98	15.995,98
			Meningkatnya produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya yang	Kontribusi sector perikanan terhadap PDRB-ADHK		%	7,14	6,85	6,55	6,26	5,97	5,67	5,38	5,38

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ket	Stn	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			lestari											
			Meningkatnya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial	Persentase penduduk miskin		%	11,04	10,08	9,90	9,70	9,50	9,30	9,15	9,15
B	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)				Indeks	64,00	65,00	66,00	66,50	67,00	68,00	69,00	69,00
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			Skor (1-10)	Skor	na	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,5
			Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas antar wilayah	Persentase zona / wilayah dengan tingkat aksesibilitas tinggi		%	NA	15	17	20	22	24	25	25
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penyediaan air baku dan penanggulangan masalah rob dan abrasi	Indeks standar pencemaran udara	Baik (0-51), Sedang (51-101), tidak sehat (101-199), sangat tidak sehat (200-299), berbahaya (300-3000)	indeks	na	50	49	48	47	46	45	45

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ket	Stn	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				Indeks pencemaran air										
				Rasio Ruang Terbuka Hijau		%	na	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	85.00
				Persentase penurunan luasan rob dan abrasi		%	na	0.20	0.19	0.17	0.15	0.12	0.10	0.10
				Persentase ketersediaan air yang memenuhi kualitas standar air baku		%	na	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00
4	Misi 4: Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur													
A	Meningkatkan system keamanan lingkungan dan kepekaan sosial serta pengamalan nilai agama dan budaya	Indeks rasa aman			indeks	na	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	6,00	6,00	
Persen konflik Sosial dan Budaya			%	na	7	6	5	4	3	4	4			
Terciptanya keamanan lingkungan dan early warning system penanggulangan bencana		Persentase penurunan angka kriminalitas	%	13,0	12,5	12,3	12,2	12,0	11,95	11,90	11,90			
		Penurunan kerugian bencana	Rp juta	4.831,10	4.641,50	4.459,33	4.284,32	4.116,17	3.954,66	3.799,42	3.799,42			

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ket	Stn	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			Meningkatnya integrasi nilai – nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat	Persentase konflik SARA		%	0	0	0	0	0	0	0	0

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 34 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYESUAIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR,
 DAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Tabel 6.10

Hubungan Misi dengan Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City yang didukung pengembangan kerjasama	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi OPD yang mendapat opini WBK	Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat Batang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan publik yang prima melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas	Peningkatan dan standarisasi standar pelayanan layanan publik seperti ketersediaan SPP dan SOP serta kualitas sumberdaya manusia yang melayani langsung masyarakat.
				Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Indeks Profesionalitas ASN		Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui optimalisasi pendidikan dan pelatihan aparatur secara bertahap dan berjenjang serta

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
						penerapan reward dan punishment	penerapan reward dan punishment secara bertahap dan terencana
					Nilai SAKIP	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah (e planning) serta menjaga konsistensi dan sinergitas pembangunan daerah	Perencanaan yang berkualitas dengan fokus pada perencanaan partisipatif yang responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat Batang.
					Nilai LPPD		Penguatan dan pembudayaan inovasi dalam berbagai sektor utamanya pengembangan dan pelaksanaan sistem inovasi daerah(SIDa) secara bertahap dan terencana melalui Roadmap SIDa dan pengembangan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) Kabupaten Batang
					Opini BPK	Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah melalui penguatan sistem pengawasan internal dan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang didukung dengan sinergitas perencanaan dan evaluasi yang komprehensif	Peningkatan kompetensi aparatur utamanya kapasitas aparatur dalam pelaksanaan Penatausahaan dan pembukuan keuangan daerah; Pengembangan Sistem peningkatan kompetensi APIP; dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
							Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan fokus pada sumber dan objek pajak dan retribusi yang belum optimal
					Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)	Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) melalui perencanaan dan pengembangan TIK dengan lebih terencana dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Batang	Pembangunan Sarana Prasarana utamanya pada dimensi infrastruktur yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK seperti hardware dan software; Jaringan komunikasi (LAN, WAN, Internet); Service delivery channel atau saluran layangan informasi baik melalui web, telepon, SMS atau saluran-saluran lain;

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
					Smart City/ Smart Village	Pengembangan layanan masyarakat dan layanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang integrated dan mudah diakses oleh masyarakat Batang	Pengembangan Batang sebagai Smart City yang didukung dengan akselerasi pengembangan smart village yang mendorong pengembangan dan pemasaran potensi unggulan lokal
2	Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu	Meningkatkan kualitas manusia Batang seutuhnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang paripurna secara holistik	Angka Harapan Hidup	<p>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi kualitas pelayanan dan sarana prasarana kesehatan yang dekat dengan masyarakat, peningkatan layanan puskesmas dan peningkatan upaya perbaikan gizi keluarga</p> <p>Meningkatkan penyediaan informasi publik yang komprehensif dan up to date dengan penerapan teknologi informasi</p>	<p>Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan fokus pada pelayanan dasar dan pelayanan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak balita. Penguatan dan peningkatan kemitraan dengan dunia usaha, ormas dan LSM untuk berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan</p> <p>Peningkatan sarana prasarana dan ketersediaan layanan kesehatan dengan fokus pada revitalisasi Fungsi dan Peran Posyandu, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap dan RSUD Batang</p> <p>Penguatan dan pemberdayaan inovasi layanan publik dengan fokus pada layanan website dan aplikasi layanan mobile</p>

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
						berbasis website	yang efektif dan dekat dengan masyarakat utamanya pada layanan yang sering diakses oleh masyarakat
							Penyediaan data dan informasi yang komprehensif, mutakhir dan up to date yang dapat menunjang akselerasi pembangunan di Batang
							Peningkatan aspek pengelolaan dan penataan kearsipan dengan fokus pada sumber daya arsiparis yang kompeten dan ketersediaan pusat arsip daerah
				Meningkatnya pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang	Rata-rata Nilai ujian nasional SD/MI dan SMP/MTs	Peningkatan kualitas, ketersediaan dan aksesibilitas layanan pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal melalui pengembangan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan standar kompetensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan dengan fokus pada penyetaraan kualifikasi strata pendidikan dan kompetensi utamanya pada pendidikan dasar dan non formal. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap untuk memenuhi standar dalam SNP (Standar Nasional Pendidikan);
							Pemberian beasiswa dengan fokus kepada peserta didik yang tidak mampu secara finansial

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
							agar dapat untuk mengenyam pendidikan dasar.
						Meningkatkan pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan daerah, masyarakat dan sekolah	Peningkatan minat baca masyarakat dengan fokus pada masyarakat generasi muda dan pelajar
						Memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan/ perguruan tinggi	Inisiasi dan optimalisasi kerjasama dengan perguruan tinggi ternama di Jawa Tengah dengan focus pada penyediaan lahan dan kerjasama dibidang pertanian dan peternakan, serta menyediakan dana bantuan Pendidikan bagi putra putri terbaik daerah
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkeadilan gender serta pengendalian penduduk	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatkan peran lembaga masyarakat melalui penguatan kapasitas dan akses usaha dalam menopang kemandirian, ekonomi dan partisipasi dalam pembangunan	Peningkatan kelembagaan masyarakat dengan fokus pada kualitas sumber daya dan sarana prasarana lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang ada sesuai dengan standar
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup dan partisipasi perempuan melalui penguatan kelembagaan PUG (pengarusutamaan gender)	Penguatan pemahaman dinas dan pemangku kepentingan terkait konsep kesetaraan gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan focalpoint, gugus tugas dan sumber daya manusia terkait

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
							Pemberdayaan Perempuan
					Kecamatan ramah Anak		Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan fokus pada strategi dan rencana aksi daerah menuju Kabupaten layak anak dengan pengembangan pada kecamatan dan desa ramah anak
				Terwujudnya pengendalian penduduk dan meningkat validitas database kependudukan	Pertumbuhan penduduk per tahun	Meningkatkan pengendalian dan pertumbuhan penduduk melalui sosialisasi berkelanjutan, peningkatan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam ber KB	Peningkatan kualitas pelayanan KB dengan fokus pada pelayanan kontrasepsi bagi penduduk miskin
					Menurunnya persentase data ganda dan anomali	Meningkatkan layanan administrasi kependudukan melalui sistem informasi berbasis web	Optimalisasi layanan yang berkaitan dengan layanan dasar administrasi kependudukan dan catatan sipil (KTP, akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak) serta optimalisasi PATEN
				Meningkatkan kemampuan pemuda berwirausaha dalam	Persentase lapangan usaha yang diciptakan oleh pemuda	Mendorong kemampuan dan kemandirian Pemuda Berwirausaha melalui	Penguatan kemandirian dan akses modal bagi pemuda yang berwirausaha

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
				mengelola potensi local serta pengembangan industri kreatif		penguatan jaringan, penggalian potensi lokal dan akses terhadap pasar dan permodalan	dengan fokus pada pemuda desa dan penggalian usaha dan produk berbasis keunggulan lokal setempat
				Meningkatnya akses permodalan, kualitas dan daya saing koperasi serta UMKM	Kontribusi jasa keuangan terhadap lapangan usaha "jasa keuangan dan asuransi" pada PDRB ADHB	Peningkatan kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM berbasis masyarakat	Peningkatan kapasitas dan pembinaan bagi pelaku UMKM yang produktif dengan fokus pada pemberian akses permodalan dan peningkatan kualitas dan pemasaran produk yang dihasilkan
					Pertumbuhan produktifitas UMKM		
3	Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat	-Pertumbuhan Ekonomi -Pendapatan per kapita	Meningkatnya jumlah nilai investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Batang	Jumlah realisasi nilai investasi	Meningkatkan investasi di Batang melalui optimalisasi promosi investasi secara berkelanjutan di berbagai media, penyediaan dan penyederhanaan pelayanan dan perijinan investasi serta pemberian insentif atau keringanan pajak	Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan promosi investasi dengan fokus pada penetapan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan dalam penanaman modal dan investasi. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana investasi
					Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan kesempatan kerja melalui penyediaan lapangan kerja baru dan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja	Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi tenaga kerja berbasis teknologi informasi yang mudah diakses oleh calon tenaga

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
							kerja; optimalisasi balai latihan kerja untuk penyiapan dan penyediaan tenaga kerja yang siap di pasar tenaga kerja serta pemberian sertifikasi kompetensi pada tenaga kerja
					Pertumbuhan Industri	Meningkatkan pengembangan kawasan industri dan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku dan penggunaan teknologi produksi industri	Meningkatkan pengembangan kawasan industri dan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku dan penggunaan teknologi produksi industri
					Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB		
				Meningkatnya produktifitas pangan dan pertanian serta kawasan perdagangan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	Meningkatkan produktivitas pertanian dengan fokus pada optimalisasi distribusi sarana prasarana pertanian dan pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna	Peningkatan produktivitas pertanian dengan fokus pada pemberian subsidi dan bantuan sarana prasarana pertanian yang dibutuhkan, pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Peningkatan sistem pertanian dengan jejaring bisnis dari hulu ke hilir yang terintegrasi. Pembuatan Demplot Pertanian dan peternakan terpadu di setiap kecamatan.

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah		Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dengan melakukan kampanye/promosi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
					Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Meningkatkan kinerja perdagangan melalui pengembangan jaringan perdagangan dan pemasaran dalam negeri dan luar negeri.	Peningkatan dan fasilitasi pengembangan jaringan dan produk unggulan Batang serta dukungan penyediaan sarana perdagangan
				Berkembangnya objek pariwisata unggulan dan destinasi wisata baru kawasan pesisir	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	Meningkatkan upaya pengembangan pariwisata melalui upaya pengembangan destinasi wisata baru dan peningkatkan promosi dan kerjasama pariwisata	Peningkatan sektor pariwisata dengan fokus pada revitalisasi objek wisata yang ada serta pengembangan destinasi wisata baru yang edukatif serta berbasis pemberdayaan masyarakat
							Peningkatan promosi dan kerjasama utamanya dengan penyedia jasa pariwisata dan penguatan dan pemberdayaan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)
				Meningkatnya produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya yang lestari	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHK	Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya melalui penyediaan sarana prasarana dan penguatan keterampilan teknis kapasitas dari pelaku perikanan budidaya dan nelayan tangkap	Peningkatan produksi perikanan dengan fokus pada pemberdayaan dan pelatihan sumberdaya nelayan serta peningkatan dukungan dan bantuan sarana dan prasarana perikanan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
							Pembuatan Demplot Perikanan di tiga kecamatan pesisir.
				Meningkatnya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial	Persentase penduduk miskin	Meningkatkan jaminan perlindungan sosial dan penanganan PMKS secara komprehensif dan berkemanusiaan	Peningkatan jaminan perlindungan dan rehabilitasi sosial yang difokuskan pada keluarga rentan, penyandang cacat dan anak terlantar
							Optimalisasi dan peningkatan sarana parasana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sosial
		Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan antar wilayah	Persentase zona/wilayah dengan tingkat aksesibilitas tinggi	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan serta pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	Peningkatan pemerataan dan kualitas jalan dan jembatan dengan fokus pada pemantauan kondisi jalan secara berkala serta penanganan pemeliharaan jalan secara responsif.
				Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau, penyediaan air baku dan penanggulangan masalah rob dan abrasi	Rasio ruang terbuka hijau	Meningkatkan ketersediaan dan luasan ruang terbuka hijau melalui pengadaan secara bertahap dan penegakan aturan tata ruang	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perhubungan pada jaringan jalan serta pengembangan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan angkutan massal
							Peningkatan ketersediaan dan luasan ruang terbuka hijau dengan fokus pada kawasan sekitar perkotaan Batang

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
					Indeks standar pencemaran udara	Meningkatkan kualitas lingkungan dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui upaya pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan kelestarian lingkungan terutama pada masyarakat yang rawan longsor dan terkena dampak dari kerusakan lingkungan.
					Persentase penurunan luasan rob dan abrasi		Peningkatan penanggulangan masalah Rob dan Abrasi dan peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan air baku
					Persentase ketersediaan air yang memenuhi kualitas standar air baku		
4	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur	Meningkatkan sistem keamanan lingkungan dan kepekaan sosial serta pengamalan nilai agama dan budaya	Indeks rasa aman Persen knflik sosial dan budaya	Terciptanya keamanan lingkungan dan early warning sistem penanggulangan bencana	Persentase penurunan angka m kriminalitas	Membangkitkan kembali sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi dalam bentuk sistem peringatan dini dan pelaporan tindakan kriminal bersama Kepolisian yang ada di Kabupaten Batang	Peningkatan keamanan lingkungan dengan fokus pada penguatan peran siskamling dan jumlah linmas
					Penurunan kerugian bencana	Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dan stakeholders terkait dalam penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana yang difokuskan pada upaya pengurangan risiko, pencegahan dini dan kerentanan bencana
				Meningkatnya integrasi nilai – nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat	Persentase penurunan konflik SARA	Optimalisasi Peningkatan perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan kebudayaan melalui penggalan dan pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Batang	Peningkatan upaya pelestarian dilakukan kepada generasi muda, masyarakat pelaku seni dan budaya dan diprioritaskan untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi dan nilai-nilai budaya

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
						Meningkatkan toleransi dan keamanan masyarakat Batang melalui penguatan wawasan kebangsaan dan toleransi antar umat beragama	Peningkatan sinergitas antar stakeholders terkait dalam perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 34 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYESUAIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR,
 DAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Tabel 6.11

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Pada Misi 1 RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (Bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi OPD yang mendapat opini WBK	Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat Batang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan publik yang prima melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas	Peningkatan dan standarisasi standar pelayanan layanan publik seperti ketersediaan SPP dan SOP serta kualitas sumberdaya manusia yang melayani langsung masyarakat.	Program Penguatan E Government dan Layanan Publik Prima	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan	Fungsi Penunjang Setda	Setda (Bag. Organisasi, Bag. Hukum, Bag. Umum)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (Bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
								Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pendukung operasional OPD	Semua PD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (Bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
								Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengendalian Mutu dan peningkatan kompetensi ASN Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penataan Peraturan PerundangUndangan		
						Optimalisasi peran kerjasama antar daerah dengan fokus pada inventarisasi dan penguatan kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan berbagai stakeholders yang mendukung optimalisasi penyelenggaraan	Pengembangan kerjasama antar daerah demi pertumbuhan, kemajuan dan kesejahteraan	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Fungsi Penunjang Setda	Bag. Humas

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (Bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
						pembangunan				
			Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Indeks Profesionalitas ASN	Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui optimalisasi pendidikan dan pelatihan aparatur secara bertahap dan berjenjang serta penerapan reward dan punishment	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur terutama pada pelaksanaan diklat fungsional dan teknis penunjang pelaksanaan tugas fungsi serta penerapan reward dan punishment secara bertahap dan terencana	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan PNS dan Pegawai Tetap Non PNS, Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas di Instansi Pemerintahan Batang	Peningkatan Disiplin Aparatur Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendukung operasional OPD	Semua PD
								Pendidikan Kedinasan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Fungsi Penunjang Kepegawaian	BKD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (Bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
				Nilai SAKIP	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah (e planning) serta menjaga konsistensi dan sinergitas pembangunan daerah	Perencanaan yang berkualitas dengan fokus pada perencanaan partisipatif yang responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat Batang.	Perencanaan partisipatif yang responsif dan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat (Tilik Warga)	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerinath	Fungsi Penunjang Setda	Setda (Bag. Organinsasi)
								Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	Fungsi Penunjang Perencanaan	Bapelitbang
								Perencanaan Pembangunan bidang Pemsosbud		
								Perencanaan Pembangunan bidang IPW		
								perencanaan pembangunan daerah		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (Bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
								pengembangan data/informasi/statistik daerah		
				Nilai LPPD		Penguatan dan pembudayaan inovasi dalam berbagai sektor utamanya pengembangan dan pelaksanaan sistem inovasi daerah(SIDa) secara bertahap dan terencana melalui Roadmap SIDa dan pengembangan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbang (Penelitian dan Pengembangan) Kabupaten Batang		<p>Penelitian dan Pengkajian Pembangunan Daerah</p> <p>Pengembangan Inovasi dan Penerapan Iptek</p>	Fungsi Penunjang Perencanaan	Bapelitbang
								penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip	Urusan perpustakaan	Disperpuska & Arsip

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (Bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
								daerah	Urusan arsip	
								perbaiki sistem administrasi kearsipan		
								Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Urusan Sekretariat DPRD	Setwan
				Opini BPK	Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah melalui	Peningkatan kompetensi aparatur utamanya kapasitas		Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Fungsi Penunjang Pengawasan	Inspektorat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (Bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
					penguatan sistem pengawasan internal dan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang didukung dengan sinergitas perencanaan dan evaluasi yang komprehensif	aparatur dalam pelaksanaan Penatausahaan dan pembukuan keuangan daerah; Pengembangan Sistem peningkatan kompetensi APiP; dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDh		
						Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan fokus pada sumber dan objek pajak dan retribusi yang belum optimal		peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Fungsi Penunjang Keuangan	BPKPAD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (Bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
				Skor PeGi (Pemeringkatan E Government) Smart City/ Smart Village	Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) melalui perencanaan dan pengembangan TIK dengan lebih terencana dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Batang	Pembangunan Sarana Prasarana utamanya pada dimensi infrastruktur yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK seperti hardware dan software; Jaringan komunikasi (LAN, WAN, Internet); Service delivery channel atau saluran layanan informasi baik melalui web, telepon, SMS atau saluran-saluran lain;	Program Smart Village (Desa Pintar), One Village One Product (1)	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Urusan KOMunikasi dan Informatika	Diskominfo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (Bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
					Pengembangan layanan masyarakat dan layanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang integrated dan mudah diakses oleh masyarakat Batang	Pengembangan Batang sebagai Smart City yang didukung dengan akselerasi pengembangan smart village yang mendorong pengembangan dan pemasaran potensi unggulan lokal	Program Smart Village (Desa Pintar), One Village One Product (1)			Diskominfo

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 34 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYESUAIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR,
 DAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Tabel 6.12

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Pada Misi 2 RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
1	Meningkatkan kualitas manusia Batang seutuhnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang paripurna secara holistik	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi kualitas pelayanan dan sarana prasarana kesehatan yang dekat dengan masyarakat, peningkatan layanan puskesmas dan peningkatan upaya perbaikan gizi keluarga	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan fokus pada pelayanan dasar dan pelayanan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak balita. Penguatan dan peningkatan kemitraan dengan dunia	Revitalisasi Fungsi dan Peran Posyandu, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap dan RSUD Batang Untuk Memberikan Layanan Kesehatan Paripurna Kepada Masyarakat Batang Serta Pengadaan Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Ditiap Desa (9)	Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Obat dan perbekalan Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Standarisasi Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan dan	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
						usaha, ormas dan LSM untuk berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan		Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Pelayanan Kesehatan		
						Peningkatan sarana prasarana dan ketersediaan layanan kesehatan dengan fokus pada revitalisasi Fungsi dan Peran Posyandu, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap dan RSUD Batang		Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)	Urusan Kesehatan	RSUD
			Meningkatnya pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi	Rata-rata Nilai ujian nasional SD/MI dan SMP/MTs	Peningkatan kualitas, ketersediaan dan aksesibilitas layanan pendidikan	Peningkatan standar kompetensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan	Menyelenggarakan Pendidikan Menengah Terjangkau, Beasiswa Untuk Mahasiswa,	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Peningkatan Mutu	Urusan Pendidikan	Disdikbud

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
			seluruh penduduk Batang		PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal melalui pengembangan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan	tenaga kependidikan dengan fokus pada penyetaraan kualifikasi strata pendidikan dan kompetensi utamanya pada pendidikan dasar dan non formal. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap untuk memenuhi standar dalam SNP (Standar Nasional Pendidikan); Pemberian beasiswa dengan fokus kepada peserta didik yang tidak mampu secara finansial agar dapat untuk mengenyam pendidikan dasar.	Optimalisasi Kesejahteraan Guru Honorer Dan Madrasah Diniyah Melalui Pemberian Insentif Bulanan (6)	Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal Manajemen Pelayanan Pendidikan		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
					Meningkatkan pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan daerah, masyarakat dan sekolah	Peningkatan minat baca masyarakat dengan fokus pada masyarakat generasi muda dan pelajar		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Urusan perpustakaan	Disperpuska dan Arsip
					Memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan/ perguruan tinggi	Inisiasi dan optimalisasi kerjasama dengan perguruan tinggi ternama di Jawa Tengah dengan focus pada penyediaan lahan dan kerjasama dibidang pertanian dan peternakan, serta menyediakan dana bantuan Pendidikan bagi putra putri terbaik daerah		Manajemen Pelayanan Pendidikan	Urusan Pendidikan	Disdikbud

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkeadilan gender serta pengendalian penduduk	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatkan peran lembaga masyarakat melalui penguatan kapasitas dan akses usaha dalam menopang kemandirian, ekonomi dan partisipasi dalam pembangunan	Peningkatan kelembagaan masyarakat dengan fokus pada kualitas sumber daya dan sarana prasarana lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang ada sesuai dengan standar		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	DP3AP2KB
								Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dispermades
				Indeks Pemberdayaan	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup	Penguatan pemahaman dinas dan		Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan	Urusan Pemberdayaan Perempuan	DP3AP2KB

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
				Gender (IDG)	dan partisipasi perempuan melalui penguatan kelembagaan PUG (pengarusutamaan gender)	pemangku kepentingan terkait konsep kesetaraan gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan focalpoint, gugus tugas dan sumber daya manusia terkait Pemberdayaan Perempuan		Perempuan	dan Pelindungan Anak	
								Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dispermades
				Kecamatan ramah Anak		Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan fokus pada strategi dan rencana aksi daerah menuju Kabupaten layak anak dengan pengembangan pada kecamatan dan desa ramah anak		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	DP3AP2KB

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
			Terwujudnya pengendalian penduduk dan meningkat validitas database kependudukan	Pertumbuhan penduduk per tahun	Meningkatkan pengendalian dan pertumbuhan penduduk melalui sosialisasi berkelanjutan, peningkatan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam ber KB	Peningkatan kualitas pelayanan KB dengan fokus pada pelayanan kontrasepsi bagi penduduk miskin		Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan Keluarga Berencana	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3AP2KB
								Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Urusan Transmigrasi	Disnaker
				Menurunnya persentase data ganda dan anomali	Meningkatkan layanan administrasi kependudukan melalui sistem informasi berbasis web	Optimalisasi layanan yang berkaitan dengan layanan dasar administrasi kependudukan dan catatan sipil (KTP, akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak) serta optimalisasi PATEN		Penataan Administrasi Kependudukan	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
			Meningkatkan kemampuan	Persentase lapangan usaha	Mendorong kemampuan dan	Penguatan kemandirian dan	Program 1000 Pemuda Desa	peningkatan peran	Urusan Pemuda dan	Disparpora

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
			pemuda berwirausaha dalam mengelola potensi local serta pengembangan industri kreatif	yang diciptakan oleh pemuda	kemandirian Pemuda Berwirausaha melalui penguatan jaringan, penggalan potensi lokal dan akses terhadap pasar dan permodalan	akses modal bagi pemuda yang berwirausaha dengan fokus pada pemuda desa dan penggalan usaha dan produk berbasis keunggulan lokal setempat	Berwirausaha	serta kepemudaan	Olah raga	
								Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Urusan Koperasi dan UKM	Disperindagkop
			Meningkatnya akses permodalan, kualitas dan daya saing koperasi serta UMKM	Kontribusi jasa keuangan terhadap lapangan usaha "jasa keuangan dan asuransi" pada PDRB ADHB	Peningkatan kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM berbasis masyarakat	Peningkatan kapasitas dan pembinaan bagi pelaku UMKM yang produktif dengan fokus pada pemberian akses permodalan dan peningkatan kualitas dan pemasaran produk yang dihasilkan		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pengembangan industri kecil dan menengah	Urusan Koperasi dan UKM	Disperindagkop

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
				Pertumbuhan produktifitas UMKM						

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 34 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYESUAIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR,
 DAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Tabel 6.13

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Pada Misi 3 RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan per kapita	Meningkatnya jumlah nilai investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Batang	Jumlah realisasi nilai investasi	Meningkatkan investasi di Batang melalui optimalisasi promosi investasi secara berkelanjutan di berbagai media, penyediaan dan penyederhanaan pelayanan dan perijinan investasi serta pemberian insentif atau keringanan pajak	Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan promosi investasi dengan fokus pada penetapan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan dalam penanaman modal dan investasi. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana investasi	100 Investasi Baru di Batang	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Urusan Penanaman Modal	DPMPSTP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
				Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan kesempatan kerja melalui penyediaan lapangan kerja baru dan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja	Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi tenaga kerja berbasis teknologi informasi yang mudah diakses oleh calon tenaga kerja; optimalisasi balai latihan kerja untuk penyiapan dan penyediaan tenaga kerja yang siap di pasar tenaga kerja serta pemberian sertifikasi kompetensi pada tenaga kerja	10.000 Lapangan Pekerjaan Baru	Peningkatan Kesempatan Kerja	Urusan Tenaga Kerja	Disnaker
				Pertumbuhan Industri	Meningkatkan pengembangan kawasan industri dan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku dan penggunaan teknologi produksi industri	Meningkatkan pengembangan kawasan industri dan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku dan penggunaan teknologi produksi industri		Pengembangan Industri kecil dan menengah	Urusan perindustrian	Disperindagkop
				Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB				Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Urusan perindustrian	Disperindagkop

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
			Meningkatnya produktifitas pangan dan pertanian serta kawasan perdagangan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	Meningkatkan produktivitas pertanian dengan fokus pada optimalisasi distribusi sarana prasarana pertanian dan pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna	Peningkatan produktivitas pertanian dengan fokus pada pemberian subsidi dan bantuan sarana prasarana pertanian yang dibutuhkan, pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Peningkatan sistem pertanian dengan jejaring bisnis dari hulu ke hilir yang terintegrasi. Pembuatan Demplot Pertanian dan peternakan terpadu di setiap kecamatan.	Pelatihan Peningkatan Produksi Dan Penyuluhan Pertanian Dan Perkebunan Serta Memberikan Subsidi, Bantuan Sarana Prasarana Yang Diperlukan (8)	peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Urusan Pertanian	Dispaperta
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah		Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dengan melakukan		peningkatan Ketahanan Pangan	Urusan Pangan	Dispaperta

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
						kampanye/promosi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.				
				Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Meningkatkan kinerja perdagangan melalui pengembangan jaringan perdagangan dan pemasaran dalam negeri dan luar negeri.	Peningkatan dan fasilitasi pengembangan jaringan dan produk unggulan Batang serta dukungan penyediaan sarana perdagangan		Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Urusa Perdagangan	Disperindagkop
			Berkembangnya objek pariwisata unggulan dan destinasi wisata baru kawasan pesisir	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	Meningkatkan upaya pengembangan pariwisata melalui upaya pengembangan destinasi wisata baru dan peningkatkan promosi dan kerjasama pariwisata	Peningkatan sektor pariwisata dengan fokus pada revitalisasi objek wisata yang ada serta pengembangan destinasi wisata baru yang edukatif serta berbasis pemberdayaan masyarakat	Revitalisasi Objek Wisata Dan Membangun Destinasi Wisata Baru Yang Edukatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (7)	Program pengembangan destinasi pariwisata pengembangan pemasaran pariwisata	Urusan Pariwisata	Disparpora
						Peningkatan promosi dan kerjasama utamanya dengan penyedia jasa pariwisata dan penguatan dan				

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
						pemberdayaan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)				
			Meningkatnya produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya yang lestari	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHK	Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya melalui penyediaan sarana prasarana dan penguatan keterampilan teknis kapasitas dari pelaku perikanan budidaya dan nelayan tangkap	Peningkatan produksi perikanan dengan fokus pada pemberdayaan dan pelatihan sumberdaya nelayan serta peningkatan dukungan dan bantuan sarana dan prasarana perikanan serta Pembuatan Demplot Perikanan di tiga kecamatan pesisir.	Pelatihan Peningkatan Produksi Perikanan Serta Memberikan Subsidi, Bantuan Sarana Prasarana Yang Diperlukan (8)	pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya	Urusan Kelautan dan Perikanan	Dislutkannak
			Meningkatnya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial	Persentase penduduk miskin	Meningkatkan jaminan perlindungan sosial dan penanganan PMKS secara komprehensif dan berkemanusiaan	Peningkatan jaminan perlindungan dan rehabilitasi sosial yang difokuskan pada keluarga rentan, penyandang cacat dan anak terlantar	Santunan Kematian dan Optimalisasi Dana RT (3)	Pelayanan , Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan perlindungan Sosial	Urusan Sosial	Dinsos
						Optimalisasi dan peningkatan sarana parasana		Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
						sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sosial		Sosial		
						Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin		Lingkungan Sehat Perumahan pengembangan perumahan	Urusan Permahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPRKP
					pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan	Peningkatan kesempatan berusaha dan bekerja, peningkatan keterampilan, dan penigkatan produktivitas untuk peningkatan pendapatan		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Peningkatan Kesempatan Kerja	Urusan Tenaga Kerja	Disnaker
	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan antar wilayah	Persentase zona/wilayah dengan tingkat aksesibilitas tinggi	Meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan serta pembangunan dan rehabilitasi jalan dan	Peningkatan pemerataan dan kualitas jalan dan jembatan dengan fokus pada pemantauan kondisi jalan secara berkala serta penanganan pemeliharaan jalan secara	Program Jalan Desa Mulus, Jembatan Penghubung Halus, Irigasi Terurus (4)	Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Urusan PUPR	DPUPR

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
					jembatan	responsif.		Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		
					Meningkatkan kualitas pengelolaan transportasi melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, penataan trayek, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perhubungan pada jaringan jalan serta pengembangan sistem management dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan angkutan massal		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan Peningkatan pelayanan angkutan Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Urusan Perhubungan	Dishub
								Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Urusan Olah Raga	Disparpora
								penyelesaian permasalahan pertanahan	Urusan Pertanahan	DPRKP
			Meningkatnya pengelolaan	Rasio ruang terbuka hijau	Meningkatkan ketersediaan dan	Peningkatan ketersediaan dan		Penataan Ruang Terbuka Hijau	Urusan PUPR	DPUPR

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
			ruang terbuka hijau, penyediaan air baku dan penanggulangan masalah rob dan abrasi		luasan ruang terbuka hijau melalui pengadaan secara bertahap dan penegakan aturan tataruang	uasan ruang terbuka hijau dengan fokus pada kawasan sekitar perkotaan Batang		(RTH) Perencanaan Tata Ruang		
				Indeks standar pencemaran udara	Meningkatkan kualitas lingkungan dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui upaya pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan kelestarian lingkungan terutama pada masyarakat yang rawan longsor dan terkena dampak dari kerusakan lingkungan.		Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup rehabilitasi hutan dan lahan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
				Persentase penurunan		Peningkatan penanggulangan		Pengembangan dan pengelolaan	Urusan PUPR	DPUPR

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
				luasan rob dan abrasi		masalah Rob dan Abrasi dan peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan air baku		jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 34 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYESUAIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR,
 DAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Tabel 6.14

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Pada Misi 4 RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
1	Meningkatkan sistem keamanan lingkungan dan kepekaan sosial serta pengamalan nilai agama dan budaya	Indeks rasa aman Persen konflik sosial dan budaya	Terciptanya keamanan lingkungan dan early warning sistem penanggulangan bencana	Persentase penurunan angka kriminalitas	Membangkitkan kembali sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi dalam bentuk sistem peringatan dini dan pelaporan tindakan kriminal bersama Kepolisian yang ada di Kabupaten Batang	Peningkatan keamanan lingkungan dengan fokus pada penguatan peran siskamling dan jumlah linmas		Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Satpol PP, Kesbangpol

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
								<p>Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</p> <p>Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah</p> <p>Pengembangan wawasan kebangsaan</p>		
				Penurunan kerugian bencana	Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dan stakeholders terkait dalam penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana yang difokuskan pada upaya pengurangan risiko, pencegahan dini dan kerentanan bencana		<p>Pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam</p> <p>Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana</p>	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	BPBD
			Meningkatnya integrasi nilai – nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat	Persentase konflik SARA	Optimalisasi Peningkatan perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan kebudayaan melalui penggalian dan pelestarian tradisi dan nilai-	Peningkatan upaya pelestarian dilakukan kepada generasi muda, masyarakat pelaku seni dan budaya dan diprioritaskan untuk melestarikan dan		Pengembangan Nilai Budaya	Urusan Kebudayaan	Disdikbud

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pendukung (bukan Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah
					nilai budaya lokal masyarakat Batang	mengembangkan tradisi dan nilai-nilai budaya				
					Meningkatkan toleransi dan keamanan masyarakat Batang melalui penguatan wawasan kebangsaan dan toleransi antar umat beragama	Peningkatan sinergitas antar stakeholders terkait dalam perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat		Pengembangan kehidupan beragama	Urusan Sekretariat Daerah	

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 34 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYESUAIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN
 TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

TABEL 7.2
 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021				2022	
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000
Belanja Tidak Langsung			1.080.108.819		1.133.698.428		1.149.728.145		1.187.630.641		1.232.518.613		1.279.633.702			
Belanja Langsung			609.784.814		657.427.946		715.355.992		764.181.784		819.431.433		874.618.289			
Belanja Wajib PD			151.293.453		79.192.898		88.417.326		70.250.693		79.863.641		77.017.008			
Belanja Urusan			458.491.361		578.235.047		626.938.667		693.931.091		739.567.792		797.601.281			
Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar			378.502.791		429.325.617		467.617.693		485.697.421		532.765.996		571.561.719			
Urusan Pendidikan			77.531.276		84.376.955		111.638.171		121.245.375		144.943.435		150.603.399			
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			507.000		669.375		1.695.000		1.595.000		1.720.000		1.945.000		Disdikbud	
Jumlah kegiatan manajemen pelayanan pendidikan yang diselenggarakan melibatkan kerjasama dan peran serta masyarakat	Keg	4,00	4,00		7,00		10,00		9,00		10,00		9,00		9,00	
Program Pendidikan Anak Usia Dini			3.052.800		3.571.550		5.495.960		5.744.459		6.828.998		7.418.578		Disdikbud	
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini	%	76,99	77,00		78,15		79,00		79,20		80,00		82,00		82,00	
Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B	%	36,10	36,10		36,10		45,00		50,00		55,00		60,00		60,00	
Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik	%	75,00	78,00		81,00		83,00		86,00		88,00		90,00		90,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022			
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000		
Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	%	14,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00						70,00		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			68.499.596	71.468.030	94.146.475	103.027.624	121.530.495	126.639.771							Disdikbud	
Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	%	104,70	104,75	104,80	104,85	104,90	104,95	105,00						105,00		
Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat	%	94,06	95,00	95,25	95,50	96,00	96,25	96,50						96,50		
Rata-Rata Nilai Ujian SD/Sederajat	%	7,28	7,30	7,35	7,38	7,40	7,45	7,50						7,50		
Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	%	95,35	95,45	95,55	95,65	95,75	95,85	96,00						96,00		
Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat	%	80,69	80,75	80,85	81,00	81,15	81,25	81,50						81,50		
Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	%	5,25	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25						7,25		
Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	%	93,54	95,15	96,25	97,15	98,25	98,95	100,00						100,00		
Prosentase Sekolah Dasar Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) dalam kondisi baik	%	64,00	68,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						90,00		
Prosentase Sekolah Menengah Pertama Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) dalam kondisi baik	%	71,00	74,00	76,00	78,00	80,00	85,00	90,00						90,00		
Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	%	-	-	-	50,00	65,00	75,00	90,00						90,00		
Program Pendidikan Non Formal			627.030	735.000	1.725.000	1.710.000	1.725.000	1.740.000							Disdikbud	
Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	%	99,34	99,55	99,75	99,85	100,00	100,00	100,00						100,00		

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021				2022	
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000
Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	%	23,33	30,00	33,33	38,25	40,00	42,00	45,00					45,00			
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			7.844.850	7.933.000	8.575.736	9.168.292	13.138.942	12.860.050						Disdikbud		
Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	%	76,63	83,10	84,48	87,13	89,33	90,00	90,67					90,67			
Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	%	74,28	76,67	79,33	82,67	87,00	91,00	93,33					93,33			
Prosentase Guru Non PNS yang mendapatkan penghasilan melebihi UMK	%	24,00	26,00	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00					75,00			
Rata-Rata Hasil Uji Kompetensi Guru		5,40	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,00					8,00			
Urutan Kesehatan			197.527.547	215.199.682	220.612.042	226.303.328	240.499.063	239.499.992								
Program Obat dan perbekalan Kesehatan			1.894.294	1.917.305	1.930.000	2.143.000	3.158.000	3.677.000						Dinkes		
Ketersediaan jenis obat dan perbekalan kesehatan penunjang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00			
Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	%	55,56	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	61,00					61,00			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat			16.906.356	12.488.072	18.685.545	19.167.000	23.658.000	26.990.000						Dinkes		
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	99,70	99,80	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00			
Persentase ketersediaan Jenis obat esensial	%	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00			
Persentase Ketersediaan Jenis obat generik	%	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00			
Persentase Rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	49,93	55,00	59,00	62,00	65,00	67,00	70,00					70,00			
Persentase TTU/TFU yang memenuhi syarat kesehatan	%	70,63	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00					82,00			
Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	%	70,10	71,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00					80,00			
Prevalensi Balita Gizi Buruk		0,24	0,20	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16					0,16			
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			1.179.027	1.353.574	1.415.000	1.475.000	1.530.000	1.600.000						Dinkes		
Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	%	9,68	11,69	13,31	14,5	15,3	15,7	16,1					16,10			

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021				2022	
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000
Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya				7.281.338		20.361.100		16.480.000		16.015.000		15.027.069		6.693.755		Dinkes
Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas	%	59,10	60,00		63,00		67,00		69,00		72,00		75,00		75,00	
cakupan kunjungan rawat inap di puskesmas	%	1,29	1,30		1,32		1,34		1,36		1,38		1,50		1,50	
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit				975000,00		1280425,00		1365000,00		1393000,00		1603000,00		1770000,00		
Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	40,00	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		100,00		100,00	
Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	76,90	80,00		84,00		88,00		92,00		96,00		100,00		100,00	
Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	57,30	65,00		75,00		85,00		92,00		96,00		100,00		100,00	
Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Angka Kesembuhan Pengobatan TB BTA +	%	88,46	88,50		88,60		88,90		89,00		89,30		89,50		89,50	
Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru TB	Per 100.000 penduduk	91,63	104,00		105,00		106,00		107,00		108,00		109,00		109,00	
Angka Penemuan Kasus Kusta Baru	Per 100.000 penduduk	4,40	5,00		5,50		6,00		6,50		7,00		8,00		8,00	
Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	91,77	45,00		44,50		44,00		43,50		43,00		42,00		42,00	
Angka Kesakitan Malaria	Per 1.000 penduduk	0,00	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01	
Persentase Orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	62,97	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021				2022	
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	70,00	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan			53.514.666	51.002.735	50.854.914	53.742.257	55.204.516	57.550.633						Dinkes		
Persentase Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	%	6,28	6,00	5,80	5,60	5,40	5,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
Persentase Ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)	%	9,51	9,30	9,10	8,90	8,60	8,30	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	%	92,93	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	95,47	97,00	98,00	99,00	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,05	99,20	99,50	99,70	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita	%	79,88	85,00	87,00	90,00	93,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	75,26	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		
Standarisasi Pelayanan Kesehatan			1.057.935	910.966	480.000	2.135.000	1.360.000	1.590.000								
Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	42,86	66,67	95,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSParu/RSMata			37.276.866	46.796.472	41.111.582	40.868.071	46.318.478	44.718.608						RSUD		
Angka Kematian pasien yg meninggal >48 jam setelah perawatan di RS (Net Death Rate/NDR)	Per 1.000 pasien keluar	18,43	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00			
Angka Kematian kasar pasien setelah perawatan di RS (Gross Death Rate/GDR)	Per 1.000 pasien keluar	25,77	25,70	25,65	25,60	25,55	25,50	25,45	25,45	25,45	25,45	25,45	25,45			

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022			
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000		
Peningkatan cakupan kunjungan rawat jalan	%	12,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
Peningkatan cakupan kunjungan rawat inap	%	-3,89	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)			78.500.000		80.000.000		89.000.000		91.500.000		94.000.000		96.500.000			RSUD
Kepuasan Pelanggan di Rawat Jalan	%	94,40	94,50		94,60		94,70		94,80		94,90		95,00		95,00	
Kepuasan Pelanggan di Rawat Inap	%	94,50	95,00		95,50		95,60		95,70		95,80		96,00		95,50	
Uraian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			101.848.750		131.848.482		136.848.981		140.408.328		148.434.867		183.398.708			
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			14.799.890		39.809.495		41.221.856		42.300.070		44.561.530		54.989.207			DPUPR
Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan baik	%	49,25	49,25		68,45		69,53		72,01		76,65		85,16		85,16	
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			36.899.268		18.268.750		18.916.889		19.411.686		20.449.480		28.234.786			DPUPR
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	49,25	49,25		68,45		69,53		72,01		76,65		85,16			
Program Pengembangan dan Pengelolaan air baku, Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengaliran Lainnya			20.288.218		27.511.504		28.487.557		29.232.689		32.043.941		44.021.640			DPUPR
Persentase luas irigasi Kabupaten dalam kondisi	%	43,10	43,10		50,97		58,84		66,47		74,58		75,25		75,25	
Persentase ketersediaan dan kebutuhan air baku	%	8,33	8,33		8,33		8,33		8,33		8,33		8,33		8,33	
Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya			18.050.000		19.000.000		20.000.000		20.500.000		21.012.500		21.537.812,5			DPUPR
Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar			30,00		35,00		40,00		42,00		45,00		48,00			
Program Pembangunan dan pengelolaan sistem drainase dan bangunan penahan banjir/erosi			7.590.854		21.333.734		22.090.611		22.668.422		23.880.328		29.468.475			DPUPR
Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	12,25	12,25		22,85		24,05		25,63		26,68		29,23		29,23	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021				2022	
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000
Persentase panjang talud dalam kondisi baik	%	-	-	38,05	-	39,00	-	39,97	-	40,78	-	41,98	-	41,98		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan			2.646.205		1.800.081		1.868.944		1.912.698		2.014.956		2.486.468		DPUPR	
Rasio alat berat terhadap panjang jalan	%	50,72	50,72	55,35	-	58,76	-	59,10	-	60,23	-	61,67	-	61,67		
Program Perencanaan Tata Ruang			1.574.325		2.233.187		2.312.416		2.372.900		2.272.273		2.635.172		DPUPR	
Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
Rasio dokumen dan koordinasi dilapangan terkait pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan	%	12,53	12,53	22,00	-	19,50	-	19,50	-	19,50	-	19,50	-	19,50		
Program Perumahan dan Permukiman			14.029.197		12.448.301		12.898.648		12.158.375		14.029.648		14.739.488			
Program Lingkungan Sehat Perumahan			1.991.467		7.282.500		10.861.648		11.418.375		12.309.648		12.411.938		DPRKP	
Cakupan layanan akses air minum perumahan	%	72,00	-	-	-	78,00	-	80,00	-	81,00	-	83,00	-	84,00		
Cakupan layanan akses sanitasi lingkungan perumahan	%	65,00	66,00	67,00	-	70,00	-	72,00	-	74,00	-	76,00	-	77,00		
Persentase infrastruktur lingkungan perumahan yang layak	%	30,00	-	40,00	-	60,00	-	70,00	-	75,00	-	80,00	-	80,00		
Persentase taman dalam kondisi baik	%	30,00	-	-	-	60,00	-	70,00	-	80,00	-	90,00	-	100,00		
Program Pengembangan Perumahan			7.670.000		1.500.000		1.975.000		1.750.000		2.050.000		2.325.000		DPRKP	
Persentase rumah layak huni	%	60,00	63,00	66,00	-	69,00	-	72,00	-	75,00	-	78,00	-	78,00		
Persentase pengurangan huasan kawasan kumuh	%	45,00	45,00	60,00	-	75,00	-	85,00	-	90,00	-	100,00	-	100,00		
Persentase penambahan perumahan formal	%	5,00	5,00	6,00	-	7,00	-	8,00	-	9,00	-	10,00	-	10,00		
Persentase Lingkungan Pemukiman bebas kumuh	%	45,00	45,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Persentase terkendalinya pembangunan perumahan	%	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku			2.815.730		950.000		-		-		-		-		DPRKP	
Jumlah rumah tangga pengguna air minum/air bersih di perdesaaan	%	72,00	74,00	76,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			1.550.000		2.715.901		-		-		-		-		DPRKP	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021				2022	
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000
Taman dan RTH yang terbangun, tertata dan terpelihara	Per 1.000	30,00	40,00	50,00												
Program Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pemukiman Masyarakat			2.791.302		2.645.225		3.193.479		2.728.829		2.977.080		3.350.871			Satpol PP
program peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			2.791.302		2.645.225		3.193.479		2.728.829		2.977.080		3.350.871			Satpol PP
Rasio jumlah satuan linmas per 10.000	per 10.000	80,00	70,00	70,00		75,00		78,00		80,00		83,00		83,00		
Cakupan menurunnya angka penyakit masyarakat (pekat) di Kabupaten Batang	%	98,00	83,00	83,00		85,00		87,00		90,00		93,00		93,00		
Cakupan satuan pemadam kebakaran pada kab/kota yang memenuhi standar	%	80,00	82,00	82,00		83,00		85,00		87,00		89,00		89,00		
program pemeliharaan kantarantibus dan pencegahan tindak kriminal			244.845		242.295		274.650		287.500		305.000		302.500			Satpol PP
Jumlah demo tertangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
program penegakan peraturan perundang-undangan			749.996		87.750		153.250		172.750		261.250		173.500			Satpol PP
Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah	%	68,00	80,00	80,00		83,00		85,00		87,00		90,00		90,00		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan			55.000		180.000		180.000		180.000		180.000		180.000			BPBD
Persentase rehab rekon pasca bencana	%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam			248.000		294.000		635.900		648.150		775.400		760.400			BPBD
Persentase penanganan bencana	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
rasio peningkatan kemampuan kebencanaan di daerah rawan bencana	%	-	-	3		3		3		3		3		15		
rasio peningkatan kemampuan Relawan Penanggulangan bencana	%	12	12	12		12		12		12		12		72		
Program pengembangan wawasan kebangsaan			884.868		1.240.566		1.260.512		1.283.548		1.367.387		1.377.482			Keabangpol
Jumlah konflik sosial tertangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Persentase masyarakat penerima pendidikan politik	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021				2022	
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000
Jumlah masyarakat penerima pembinaan wasbang	%	82,50	82,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00			
Program Pelayanan, Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan perlindungan Sosial			0		1.373.943		1.110.000		1.137.417		1.198.419		1.212.588			
PMKS yang berhasil dirhabilitasi	%	60,00	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00			
PMKS yang berhasil diberikan perlindungan dan jaminan sosial	%	60,00	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00			
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial			644.000		908.000		1.280.000		1.310.920		1.379.718		1.395.698			
Rumah Tangga Miskin yang mengikuti Program penanggulangan kemiskinan	%	20,00	20,00	40,00	45,00	45,00	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
Rasio PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	60,00	60,00	60,00	0,65	65,00	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00			
Urusan Wajib Tidak Berkaitan			40.146.884		58.981.825		61.856.992		109.171.286		101.834.061		72.899.221			
Urusan Tenaga Kerja			3.644.319		2.909.948		3.904.500		4.378.000		4.870.000		5.018.000			
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			389.000		424.968		384.500		360.000		390.000		395.000	DPMP2SP dan Naker		
Persentase peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	%	5	5	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3			
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	per 1000	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4			
Program Peningkatan Kesempatan Kerja			1.643.654		782.000		1.810.000		2.000.000		2.400.000		2.470.000	DPMP2SP dan Naker		
Tingkat kesempatan kerja	%	95,53	95,53	94,29	94,29	94,31	94,31	94,99	94,99	96,63	96,63	96,63	96,63			
Pencari kerja yang ditempatkan	%	24,20	24,20	25,41	26,68	28,02	28,02	29,42	29,42	30,89	30,89	30,89	30,89			
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			1.611.666		1.703.000		1.740.000		1.910.000		2.080.000		2.180.000	DPMP2SP dan Naker		
Rasio penduduk yang bekerja	%	573.768	573.768	580.775	587.877	595.137	595.137	602.538	602.538	610.170	610.170	610.170	610.170			
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68,04	68,04	68,24	68,48	68,70	68,70	68,91	68,91	69,14	69,14	69,14	69,14			
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak			368.000		168.000		584.000		626.000		761.600		783.600	DP3AP2KB		

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021				2022	
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000
Persentase penanganan pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	%		80%		80		85		90		95		95		95	
Peningkatan cakupan lembaga/ instansi dalam kegiatan pengarusutamaan gender	Lembaga	3	3		4		5		6		7		8		8	
Kecamatan ramah Anak	%	13,33	13,33		26,67		40,00		53,33		66,67		80,00		80,00	
Pembentukan Kelembagaan Forum Anak (Kecamatan)	%	13,33	13,33		26,67		40,00		53,33		66,67		80,00		80,00	
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perencanaan Perumahan					283.000		217.000		273.000		315.000		409.000		481.000	DP2AP2KB
persentase perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitas upaya perlindungan perempuan dan anak	%	30 Orang	60,00		64,00		70,00		74,00		80,00		94,00		94,00	
persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	141.069 Orang	37,28		38,08		38,88		39,68		39,68		40,00		40,00	
Urutan Pangan					4.600.931		4.454.550		4.444.710		5.161.492		5.435.849		5.426.530	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan					4.600.931		4.454.550		4.444.710		5.161.492		5.435.849		5.426.530	Disapaperta
Jumlah produktivitas tanaman pangan																
a. Padi	Ton/Ha	4,5	4,5		4,62		4,68		4,72		4,78		4,82		4,82	
b. Jagung	Ton/Ha	6,28	6,28		6,34		6,41		6,47		6,53		6,6		6,6	
Skor Pola Pangan Harapan	%	84,80	84,80		85,60		86,50		87,40		88,20		89,10		89,10	
Jumlah ketersediaan energi																
a. Energi	Kal	2200	2200		2300		2400		2500		2600		2700		2700	
b. Protein	G	57	57		62		67		72		77		82		82	
Rasio desa mandiri pangan	%	0,11	0,11		0,12		0,13		0,13		0,14		0,14		0,14	
Cadangan Pangan Daerah	%	7,5	3,0		2,5		5		7,5		10		12,00			
Program Penyelesaian Permasalahan Pertanian					150.000		175.000		200.000		200.000		200.000		200.000	DPRKP
Persentase Fasilitas Hak Atas Tanah Program Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Pertanian	%				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					416.933		700.000		900.000		1.100.000		1.300.000		1.500.000	DLH
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL	%	60,00	65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		90,00	
Tingkat Pengelolaan Limbah	%	60,00	60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		90,00		90,00	
Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	5,00	5,50		6,00		6,50		7,00		7,50		8,00		8,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021				2022	
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				3.426.887,00		5.600.000,00		6.100.000,00		6.300.000,00		6.500.000,00		6.700.000,00		DLH
Persentase penanganan sampah (Kab)	%	15,00	20,00		25,00		30,00		35,00		40,00		45,00		45,00	
Program Perlindungan dan Konservasi SDA				910.400		1.800.000		2.200.000		2.500.000		2.800.000		3.100.000		DLH
Tingkat keasadaran masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%		5		10		15		20		25		30		40.000	
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2.384.505		1.515.000		1.418.152		1.468.152		1.479.600		1.564.600		
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2.384.505		1.515.000		1.418.152		1.468.152		1.479.600		1.564.600		Disdukcapil
Kepemilikan KTP	%	89,44	89,44		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
Rasio bayi ber-akta Kelahiran	%	0,86	0,86		0,90		0,90		0,90		0,90		0,90		0,90	
Rasio pasangan berakta nikah	%	0,02	0,02		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				3.461.689		4.505.407		4.689.894		4.820.150		5.061.152		5.102.745		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				1.549.004		1.496.004		1.550.116		1.606.449		1.686.768		1.703.624		Dispermades
Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	%	95,00	95,00		95,00		96,00		97,00		99,00		100,00		100,00	
Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	%	89,00	89,00		89,00		90,00		91,00		93,00		95,00		100,00	
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	96,94	98,30		98,30		98,70		99,10		99,50		100,00		100,00	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				1.912.685		3.009.403		3.129.778		3.213.701		3.374.385		3.399.121		Dispermades
Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat pada pembangunan wilayahnya	%	92,00	92,00		92,00		93,00		95,00		96,00		97,00		100,00	
Persentase Peran Perempuan di Perdesaan	%	97,80	95,40		95,40		96,80		97,60		98,75		100,00		100,00	
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1.686.178		3.364.500		3.586.500		3.701.000		4.171.152		4.299.000		
Program Keluarga Berencana				519.000		962.000		1.026.000		1.070.000		1.294.000		1.342.928		DP3AP2KB

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021				2022	
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000
Tingkat Pelayanan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Paket	250	250	6500		6500		6500		6500		6500		6500		
Peningkatan akseptor KB yang memperoleh perlindungan KB akibat pemasangan alat kontrasepsi	Orang	200	300	550		1500		1500		1600		1650		1650		
Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan	%	73,39	73,39	73,50		80,00		80,50		81,00		85,00		85,00		
Peningkatan PUS dari Keluarga Miskin yang memperoleh pelayanan pemasangan alat kontrasepsi KB	Akseptor	300	300	400		425		450		500		500		500		
Program Keluarga Sejahtera			1.137.175		2.402.500		2.530.500		2.631.000		2.877.152		2.950.152			
Persentase kelompok tribina yang aktif			90		90,25		90,35		91,00		91,25		91,50		91,50	
Persentase UPPKS yang aktif			89		90		90		91		91		92		92	
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			996.000		10.497.561		9.313.785		3.250.000		10.813.025		9.315.000			Dishub
persentase peningkatan fasilitas dan sarana perhubungan	%	20,00	24,00		39,00		55,00		70,00		85,00		100,00		100,00	
Pembangunan pelabuhan dan akses jalan	Buah	6	6		6		6				6		6		6	
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			390.500		930.000		1.050.000		285.000		950.000		250.000			Dishub
Persentase fasilitas pengamanan jalan terpasang		25	30		35		40		45		50		55		10.290.210	
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas L.L.A.J			512.000		3.600.000		3.700.000		900.000		2.100.000		4.600.000			Dishub
Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan	%	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
Program peningkatan pelayanan angkutan			306948		2.244.000		2.560.000		1.475.000		2.020.000		2.155.000			Dishub
Rasio ijin trayek	%	60,00	63,00		67,00		70,00		76,00		80,00		84,00		84,00	
Pelaksanaan Uji Petik Kelainan kendaraan	Unit	8.875	9.000		9.000		9.300		9.400		9.420		9.430		9.430	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022			
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000		
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa																
			1.248.237		3.594.629		3.839.891		4.087.664		4.542.182		4.649.247			Diskominfo
Persentase Smart Village	%	4,18	4,18	6,28	8,37	10,46	12,55	14,64	14,64							
Persentase Peningkatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase Peningkatan Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase Peningkatan alat studio dan komunikasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase Peningkatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase Peningkatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase Peningkatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Program fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi			46.155		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000			Diskominfo
Persentase Peningkatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah			375.000		690.000		930.000		990.000		1.060.000		1.060.000			Disperindagk op dan UKM
Persentase UMKM yang mendapat bantuan modal dari jasa keuangan	%	na	70	75	80,0	82,0	85	87	87							
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah			160.000		1.040.000		1.310.000		1.300.000		1.250.000		1.150.000			Disperindagk op dan UKM
Persentase wirausaha baru	%	na	5	10	15	20	25	30	30							

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021				2022	
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000
persentase pertumbuhan UMKM	%	1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2						2	
Program peningkatan Kelembagaan Koperasi				700.000	830.000	830.000	1.005.000	1.005.000	1.025.000							Disperindag op dan UKM
persentase koperasi aktif sehat			25	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5								
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				288.580	330.725	388.000	430.700	460.000	460.000							DPMPTSP
Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Bantaeng	Unit	220	500	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				550.692	655.365	653.000	700.000	750.000	770.500							DPMPTSP
Jumlah realisasi nilai investasi	Milyar	530,39	146,49	198	218	240	264	290	290	290	290	290	290	290	290	
Jumlah izin usaha yang diterbitkan	Buah	16255	3500	2700	2750	2800	2850	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
Jumlah penyerapan tenaga kerja	Orang	14730	1000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	10000	
Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta kepemudaan				1.925.000	870.000	1.018.966	1.067.634	1.077.897	1.750.000							Disparpora
Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Persentase Pemuda mandiri ekonomi	%	15,00	15,00	19,00	25,00	32,00	39,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
Peningkatan peranan pemuda dalam kewirausahaan	%	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Program Pembinaan dan pengembangan olahraga				5.600.000	3.896.000	3.015.000	55.230.000	34.778.663	5.458.540							Disparpora
Peningkatan peranan masyarakat dalam pembinaan olahraga	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga prestasi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				1.000.864	811.464	811.464	811.464	811.464	811.464							Diskominfo
Persentase ketersediaan data sektoral	%		65,00	70,00	74,00	78,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab			
			2017		2018		2019		2020		2021				2022		
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000	
Persentase badn publik yang terbuka	%		50,00		52,00		55,00		57,00		59,00		60,00		100,00		
Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi					300.000		30.000		70.000		70.000		70.000		70.000		Diskominfo
Persentase Keberhasilan Pengiriman dan Penerimaan dokumen elektronik melalui VPN	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program pengelolaan kebudayaan					2.943.168		2.767.000		3.077.000		6.017.000		4.892.000		2.922.000		Diadikbud
persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
persentase seni budaya yang difasilitasi	%	97	97,5		98		98,2		98,5		99		100		100		
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan					210.000		52.000		120.000		140.000		235.000		220.000		Disperpuska
Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku	%	75,00	75,00		80,00		80,00		80,00		85,00		85,00		85,00		
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	2,00	2,00		3,00		4,00		4,50		4,70		5,00		5,00		
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah					505.000		182.500		210.000		225.000		515.000		505.000		Disperpuska
Persentase Penyelamatan arsip atau dokumen yang mempunyai nilai guna	%	75,00	75,00		80,00		80,00		80,00		85,00		85,00		85,00		
Program Budaya Baca dan Pembinaan Peronatakaan					669.202		617.129		667.129		675.000		1.135.477		1.240.914		Disperpuska
Peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	154.171	160.000		165.000		170.000		175.000		180.000		185.000		185.000		
Peningkatan Perpustakaan Desa	Unit	10	10		25		30		35		40		45		45		
Urusan Pilihan					25.483.356		27.842.576		32.740.378		32.335.977		34.811.355		81.373.188		
Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya					979.360		1.215.601		3.643.000		3.721.000		4.242.000		4.157.000		Dislutkannak
Prosentase jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari sebelumnya	%	15,00	15,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		
Prosentase kenaikan produksi perikanan tangkap	%	4,60	4,60		5,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung jawab	
			2017		2018		2019		2020		2021		2022				
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			
Prosentase bertambahnya sarpras pada kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	%	0,00	0,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
Prosentase kenaikan tingkat konsumsi makan ikan pada masyarakat	%	15,00	15,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelautan dan Perikanan			613.500		647.525		585.189		600.000		705.000		715.000		715.000		Dislukkannak
Cakupan kelompok usaha kelautan dan perikanan	Kelompok	12	12	15		16		18		19		20		20		20	
Cakupan wilayah pengawasan dan pengendalian	Desa / Kelurahan	8	8	12		11		13		13		15		15		15	
Program peningkatan produksi hasil perikanan			3.473.310		4.157.294		4.098.496		4.127.000		4.235.000		4.341.000		4.341.000		Dislukkannak
Cakupan produksi hasil ternak																	
- Daging	Kg	1E+07	10100000	10.200.000		10.300.000		10.400.000		10.500.000		10.600.000		10.600.000		10.600.000	
- Telur	Kg	8500	8500	8.700.000		8.900.000		8.900.000		9.000.000		9.100.000		9.100.000		9.100.000	
- Susu	Lt	130000	130000	120.000		115.000		110.000		105.000		90.000		90.000		90.000	
Prosentase peningkatan konsumsi protein hewani pada masyarakat																	
- Daging	%	2,00	2,00	1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50	
- Telur	%	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
- Susu	%	0,00	0,00	0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10	
Cakupan ternak yang terobati	Tahun	45.000	45.000	52.500		54.000		54.500		55.000		55.000		55.000		55.000	
Cakupan akseptor	Ekor	7000	7000	7.000		8.000		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500	
Program Peningkatan Keasaheraan Petani			1.273.400		907.010		1.075.500		1.610.495		1.518.000		1.420.500		1.420.500		Disaperta
Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100,40	100,40	100,52		100,68		100,90		101,00		101,20		101,20		101,20	
Cakupan kelompok tani dinilai sesuai klasifikasi (Pemula/Lanjut/Madya/Utama)	Klp	0,17	0,27	0,49		0,60		0,70		0,806		0,90		0,90		0,90	
Cakupan petani terlatih budidaya pertanian/perkebunan (orang)	Klp	-	-	20		40		60		80		100		100		100	
Persentase SOP budidaya tanaman (dokumen)	%	0,05	0,10	0,20		0,30		0,40		0,50		0,60		0,60		0,60	
Program Peningkatan Produksi Pertanian			1.784.795		2.930.146		2.426.090		2.736.482		3.224.955		3.029.685		3.029.685		Disaperta
Produktivitas komoditi perkebunan																	
- Tebu		22.295	22.295	4.240		4.325		4.411		4.500		4.590		4.590		4.590	
- Teh		1.652	1.652	348		355		362		369		377		377		377	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022			
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000		
- Kopi		3.561	3.561	768		783		799		815		831		831		
- Kelapa		10.721	10.721	1.813		1.849		1.886		1.924		1.962		1.962		
- Cengkeh		1.118	1.118	250		255		260		265		271		271		
- Karet		3.801	3.801	1.000		1.020		1.040		1.061		1.082		1.082		
- Kakao		3.045	3.045	625		638		650		663		677		677		
- Aren		3.061	3.061	775		791		806		822		839		839		
- Kapok		1.877	1.877	425		434		442		451		460		460		
Persentase pembuatan screen house/ green house	%	5,00	5,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		
Persentase Jumlah demplot tanaman hortikultura ramah lingkungan	%	2	2	20		40		60		80		100		100		
Jumlah SL-GHP dan SL GAP (kali)		2	2	20		40		60		80		100		100		
Persentase Penyuluh swadaya terlatih (orang)	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Persentase rekomendasi bidang penyuluhan pertanian (dokumen)	%	-	-	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		
Jumlah areal tanaman tembakau rendah nikotin (Ha)	Ha	-	-	50		50		60		60		70		70		
Program pengembangan pemasaran pariwisata				2.552.991		3.200.000		3.500.000		3.900.000		4.150.000		22.750.000		
Peningkatan jumlah wisatawan	Orang	575.000	575.000	585.000		590.000		600.000		610.000		620.000		620.000		
Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan industri pariwisata	Orang	42	42	42		42		42		42		42		42		
Program pengembangan destinasi pariwisata				4.066.000		3.040.000		8.000.000		6.300.000		6.000.000		35.875.000		
Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata	Objek	9,00	9,00	9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		
Obyek Wisata yang ditangani	Objek	9,00	9,00	9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		
Persentase Pokdarwis	%	0,25	0,25	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				1.255.000		2.200.000		2.500.000		2.600.000		2.750.000		2.040.000		
Cakupan wira usaha baru yang membentuk KUB	KUB	33	33	0		50		60		70		80		90		
Prosentase Wirausaha baru yang mendapat fasilitas	IKM	70	70	90		100		110		120		120		120		
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi				825.000		750.000		800.000		850.000		850.000		850.000		
Cakupan bina kelompok	KUB	225	225	200		300		300		300		300		300		

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021				2022	
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000
Prosentase Pertumbuhan	%	0,60	0,60		0,70		0,80		0,80		0,90		0,90		0,90	
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				8.555.000		8.745.000		6.030.000		5.800.000		7.000.000		6.050.000		Disperindagkop dan UKM
Revitalisasi Pasar Rakyat	%	25,00	25,00		25,00		25,00		25,00		0		0		0	
Peningkatan Pelayanan UTTP	UTTP	4511	4511		5500		6500		7500		8500		9500		9500	
Cakupan jumlah nilai ekspor bersih	US \$	53.905.236	53.905.236		56.600.497		56.735.260		56.742.000		56.742.336		56.742.353		56.742.353	
Prosentase kenaikan pendapatan pasar dan PKL terhadap PAD	%		1		2		3		3		3		4		4	
Urusan Transmigrasi				78.000		150.000		82.100		91.000		136.400		145.000		
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				78.000		150.000		82.100		91.000		136.400		145.000		DPMPSTP dan Naker
Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Kepala Keluarga (KK)		5		5		5		5		5		5		5	
Fungsi Penunjang				14.457.330		61.785.029		64.723.607		66.725.437		70.456.380		72.067.156		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah				2.772.157		3.158.962		3.240.652		3.266.438		3.441.253		3.441.482		Bapelitbang
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	%	75,00	100,00		78,00		85,00		88,00		90,00		92,00		92,00	
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	%	94,00	100,00		95,00		96,00		97,00		98,00		99,00		99,00	
Nilai rata-rata capaian kinerja RKPD	%	97,25	-		-		100,00		100,00		100,00		100,00		100	
Program perencanaan pembangunan ekonomi				337.532		707.544		725.841		731.617		770.772		770.823		Bapelitbang
Persentase rata-rata pencapaian program pembangunan daerah RPJMD Bidang Ekonomi	%	80,00	84,00		85,00		85,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
Program perencanaan sosial dan budaya				474.851		707.544		725.841		731.617		770.772		770.823		Bapelitbang
Persentase rata-rata pencapaian program pembangunan daerah RPJMD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	%	80,00	100,00		82,00		83,00		85,00		87,00		89,00		89,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021				2022	
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000
Program Perencanaan Pembangunan bidang IPW				965.150		992.491		1.018.157		1.026.258		1.081.182		1.081.254		
Jumlah wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	%	1	100,00		1		1		1		1		1		1	
Jumlah pusat pertumbuhan	%	2	100,00		2		2		2		2		2		2	
Persentase dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA yang dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan	%	100,00	100,00		-		-		-		-		-		-	
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah						13.244.887		14.176.401		14.694.562		15.797.845		16.535.553		BPKPAD
Persentase OPD dengan sistem komputerisasi pengelolaan SIMDA Keuangan	%			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Persentase peningkatan PAD	%		3,00		5,00		6,00		8,00		9,00		10,00		10,00	
Persentase peningkatan mutu pelayanan pendapatan	%			80,00		80,00		85,00		85,00		90,00		90,00		90,00
Persentase terdokumentasinya aset milik pemerintah kabupaten Batang baik dari persebaran, status dan/kepemilikan serta kondisinya	%			70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		90,00		90,00
Program Pengembangan Inovasi dan Penerapan IPTEK								248.106		250.080		263.464		263.481		Bapelitbang
Persentase inovasi yang diterapkan di daerah	%		45,00		55,00		65,00		75,00		85,00		95,00		95,00	
Program Penelitian dan Pengkajian Pembangunan daerah								330.229		332.887		350.671		350.694		Bapelitbang
Persentase kajian dan penelitian yang ditindaklanjuti stakeholder terkait	%	75,00				75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00
Program Pengendalian Mutu dan peningkatan kompetensi ASN				1.597.150		2.351.914		2.491.093		2.724.189		2.964.504		2.986.111		BKD

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021				2022	
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000
Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	%	80,000	80,000		85,000		85,000		90,000		95,000		100,000		100,000	
Persentase tertibnya arsip data kepegawaian	%	95,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					1.144.183		1.394.103		1.289.090		1.234.091		1.230.501		1.255.501	BKD
Persentase penyelesaian usulan pensiun pegawai tepat waktu	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat	%	96,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Persentase pembentukan panel dalam setiap pengisian jabatan pimpinan tinggi	%	70,00	70,00		75,00		80,00		85,00		85,00		90,00		90,00	
Persentase akurasi data kepegawaian	%	98,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					5.211		1.065.561		1.100.380		1.100.380		1.125.962		1.185.103	Sekretariat Daerah
Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah			100		100		100		100		100		100		100	Bag. Pemerintahan
Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan					888.515		2.801.681		3.134.323		3.209.613		3.313.835		3.369.544	Sekretariat Daerah
Persentase layanan liputan dan keprotokolan			100		100		100		100		100		100		100	Bag. Umum
Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan			100		100		100		100		100		100		100	Bag. Umum
Persentase layanan bagian humas	%				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Bag. Humas
Penataan Peraturan Perundang-undangan					1.009.000		1.345.385		1.369.352		1.417.181		1.491.552		1.505.827	Sekretariat Daerah
Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundangundangan			91		92		93		94		95		96		96	Bag. Hukum

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021				2022	
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000
Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum			90		91		92		93		94		95	95	Bag. Hukum	
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah				3.242.650,79		5.295.978,79		5.807.420,83		6.383.500,55		6.851.049,05		7.173.011,04	Sekretariat Daerah	
Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Bag. Organisasi	
Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	%		50		60		70		80		90		100	100	Bag. Organisasi	
Persentase fasilitasi pencairan tunjangan kesejahteraan	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Bag. Kesra	
Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Kabupaten Batang	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	perencanaan	
Persentase peningkatan produksi, pengembangan dunia usaha dan sarana perekonomian	%		5		6		7		8		9		10		Bag. Perekonomian	
Persentase kegiatan dari sumber dana DBHCHT yang mencapai target	%		95		96		97		98		99		100	100	Bag. Perekonomian	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah				1.473.385,75		2.037.196,38		2.098.335,50		2.112.536,50		2.229.865,25		2.253.646,50	Sekretariat Daerah	
persentase lelang melalui e-procurement	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Bag. PBJ	
persentase penyelesaian sengketa	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Bag. PBJ	
Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%		90		91		91,5		92		92,5		93		93	Bag. Dalbang
Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Banku	%		85		86		87		88		89		90		90	Bag. Dalbang
Program Peningkatan Kapasitas DPRD						23.612.636		24.287.343		24.708.743		25.654.343		25.928.943	Sekretariat DPRD	
Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021				2022	
			Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000	Kinerja	Rp. 000			Kinerja	Rp. 000
Persentase Perda yang ditetapkan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					2.325.387		2.501.380		2.634.609		2.931.025		2.999.878			INSPEKTORAT
Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan			50		51,07		54,38		60,19		63,88		67,06		67,06	
Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan			100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					150.000		159.562		168.166		187.086		191.481			INSPEKTORAT
Prosentase Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	%	-	-		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

BUPATI BATANG.

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYESUAIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR,
 DAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Tabel 8.1.
 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	na	55,03	60,05	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
2	OPD yang mendapat opini WBK	opini	2	3	4	5	6	7	8	8
3	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Indeks	66.38	67.30	68.22	69.14	70.06	70.98	71.90	71.90
4	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	na	0,6233	0,6265	0,6297	0,6329	0,6361	0,6393	0,6393
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.93	5.11	5.23	5.41	5.73	5.81	5.93	5.93
6	Pendapatan Per Kapita	Rp juta /jiwa	22,94	23,20	23,80	24,60	25,45	26,10	27,00	27,00
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	Indeks	64,00	65,00	66,00	66,50	67,00	68,00	69,00	69,00
8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Skor	na	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,5
9	Indeks rasa aman	indeks	na	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	6,00	6,00
10	Persen konflik Sosial dan Budaya	%	na	7	6	5	4	3	4	4
11	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	na	78,23	80,05	82,57	84,23	87,67	90,32	90,32
12	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks		73,37	79,03	82,63	85,61	87,27	91,54	91,54
13	Nilai SAKIP	Skor	56,60	58,19	60,05	60,53	63,21	67,82	70,11	70,11

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
14	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Nilai LPPD	peringkat	170	160	150	140	130	120	110	110
16	Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)	Skor	na	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,60
17	Smart City/ Smart Village	%	na	4,18	6,28	8,37	10,46	12,55	14,64	14,64
18	Angka Harapan Hidup	tahun	74,46	74.50	74.54	74.58	74.62	74.66	74.70	74.70
19	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SD/MI dan SMP/MTs	angka	6,27	7,08	7,10	7,13	7,15	7,17	7,20	7,20
20	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	90.99	91.58	92.17	92.76	93.35	93.94	94.53	94.53
21	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	68.58	69.89	71,03	72,18	73,35	74,55	75,76	75,76
22	Kecamatan ramah Anak	%	na	13.33	26.67	40.00	53.33	66.67	80.00	80.00
23	Pertumbuhan Penduduk per tahun	%	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74	0,70	0,70
24	Menurunnya persentase data ganda dan anomali	%	10	9,5	9,0	8,5	8,0	7,5	7,0	7,0
25	Persentase lapangan usaha yang diciptakan oleh pemuda	%	na	15.00	19.00	25.00	32.00	39.00	45.00	45.00
26	Kontribusi jasa keuangan terhadap lapangan usaha "jasa keuangan dan asuransi" pada PDRB ADHB	%	na	14,50	14,75	15,00	15,25	15,50	15,75	15,75
27	Pertumbuhan produktifitas UMKM	%	3,31	3,33	3,36	3,37	3,42	3,45	3,50	3,50
28	Jumlah Realisasi nilai investasi	Rp/ Milyar	na	186,84	198,00	217,80	240,00	264,00	290,00	290,00
29	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	%	4.17	4.17	3.97	3.76	3.61	3.50	3.23	3.23
30	Pertumbuhan Industri	%	na	0.60	0.70	0.80	0.80	0.90	0.90	0.90
31	Kontribusi sector industri pengolahan terhadap PDRB-ADHB	%	na	24.12	24.24	24.36	24.48	24.61	24.73	24.73
32	Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB-ADHB	%	24.00	24.12	24.24	24.36	24.48	24.61	24.73	24.73
33	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah	Skor	84.80	85.60	86.50	87.40	88.20	89.10	89.10	89.10

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
34	Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	%	na	12.12	12.20	12.24	12.30	12.34	12.40	12.40
35	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	Rp (juta)	1.839,28	2.404,86	3.512,97	5.131,67	7.496,23	10.950,32	15.995,98	15.995,98
36	Kontribusi sector perikanan terhadap PDRB-ADHK	%	7,14	6,85	6,55	6,26	5,97	5,67	5,38	5,38
37	Persentase penduduk miskin	%	11,04	10,08	9,90	9,70	9,50	9,30	9,15	9,15
38	Persentase zona / wilayah dengan tingkat aksesibilitas tinggi	%	NA	15	17	20	22	24	25	25
39	Rasio Ruang Terbuka Hijau	indeks	na	50	49	48	47	46	45	45
40	Persentase penurunan luasan rob dan abrasi	%	na	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	85.00
41	Persentase ketersediaan air yang memenuhi kualitas standar air baku	%	na	0.20	0.19	0.17	0.15	0.12	0.10	0.10
42	Indeks standar pencemaran udara	%	na	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00
43	Persentase penurunan angka kriminalitas	%	13,0	12,5	12,3	12,2	12,0	11,95	11,90	11,90
44	Penurunan kerugian bencana	Rp juta	4.831,10	4.641,50	4.459,33	4.284,32	4.116,17	3.954,66	3.799,42	3.799,42
45	Persentase konflik SARA	%	0	0	0	0	0	0	0	0

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI